

Adik Prabowo Bicara soal Dugaan Korupsi Rp51 Triliun di Kemenhan

JAKARTA (IM) - Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, bicara soal dugaan praktik korupsi yang terjadi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Hashim menyebut, dugaan korupsi yang terjadi di kementerian yang dipimpin kakaknya itu sudah melewati level "gila". Bahkan, menurut dia, ada kontrak pembelian senjata yang nilainya mencapai Rp 51 triliun. Akan tetapi, setelah diperiksa, rupanya terjadi mark up besar-besaran dalam kontrak tersebut.

Hashim menegaskan, Prabowo tahan akan go-daan. Sang kakak selalu menggagalkan dugaan praktik korupsi di Kemenhan.

Hashim mulanya bercerita mengenai momen Prabowo yang baru diangkat menjadi Menteri Pertahanan pada 2019. Di bulan-bulan pertama Prabowo bekerja, ia mengatakan, sang kakak harus menandatangani kontrak senilai Rp51 triliun. Namun, kontrak yang nilainya fantastis itu ternyata terindikasi korupsi mark up.

"Rp51 triliun di atas meja dia. Dan waktu itu kami sudah dapat laporan, saya dapat laporan, di kontrak ini korupsi mark up-nya gila. Ini lebih gila, ini gila, ini gila, gilanya

memang melampaui gila, Pak," ujar Hashim di acara Guyub Nasional di Jakarta Pusat, Rabu (15/11).

Hashim mengungkapkan, nilai kontrak bisa mencapai Rp51 triliun karena pengadaan barangnya diduga di-mark up. Ia mengatakan, harga satuan senjata yang hanya 800 dollar diduga dinaikkan menjadi 10.800 dollar.

"Ada satu senjata harga pabrik 800 dollar satu senjata senapan canggih, yang datang ke mejanya Prabowo harganya 10.800 dollar. Bisa dihitung, harga asli 800, yang datang ke meja Menteri Pertahanan 10.800 dollar, mark up-nya saya hitung," kata Hashim.

"Dan waktu saya lapor ke kakak saya, dia tidak mau percaya. Karena dia sudah bicara bocoran-bocoran berapa tahun, dia dikritik sebagai 'Prabocor' karena orang enggak mau percaya. Tapi yang diduga orang lebih jelek lagi. Ada orang yang lebih rakus lagi dari orang rakus," ujarnya lagi.

Hashim menilai kerakusan di Indonesia sudah melampaui batas. Ia lantas mengingatkan bahwa uang yang mau dirampok oleh para oknum itu merupakan uang rakyat. ● han

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



LATMA PENEGAKAN HUKUM DI LAUT

Kepala Bakamla Laksdya TNI Irvansyah (tengah) memeriksa kelengkapan alat dan persenjataan saat apel latihan bersama di Dermaga Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kep. Riau, Kamis (16/11). Bakamla bersama TNI/POLRI, Basarnas, PSD-KP dan instansi terkait menggelar latihan bersama keamanan, keselamatan dan penegakan hukum 2023 sehingga menyatukan pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia.

Kejaksaan akan Tunda Periksa Kasus Korupsi Peserta Pemilu 2024

Kejaksaan Agung dipastikan netral pada Pemilu 2024, dan tetap menjaga marwah penegakan hukum agar tidak dijadikan sebagai alat politik praktis.

JAKARTA (IM) - Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin kembali menegaskan bahwa pihaknya akan menunda pemeriksaan kasus korupsi yang diduga melibatkan peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Penundaan pemeriksaan hanya berlaku pada kasus yang berada di tahap penyelidikan maupun penyidikan.

"Kami juga memerintahkan kepada jajaran tindak pidana khusus dan jajaran intelijen untuk menunda proses pemeriksaan baik dalam setiap tahap penyelidikan maupun penyidikan terhadap penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan para peserta dalam kontestasi pemilihan," kata Burhanudin dalam rapat dengan Komisi III DPR, Kamis (16/11).

Perintah itu tertuang dalam Instruksi Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan RI dalam Mendukung dan Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Penundaan pemeriksaan itu berlaku sejak penetapan mereka sebagai peserta pemilu hingga berakhirnya rangkaian penyelenggaraan Pemilu 2024.

Selain itu, Burhanudin juga menginstruksikan jajaran kejaksaan untuk mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024 sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing.

"Dengan memetakan potensi ancaman gangguan hambatan dan tantangan yang berpotensi menimbulkan tindak pidana pemilu sebagai bentuk deteksi dini

pengecambahan dini serta menemukan langkah mitigasi dalam penyelesaiannya," katanya.

Burhanudin menekankan bahwa Kejaksaan Agung senantiasa siap berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Ia memastikan bahwa Kejaksaan Agung tetap netral pada pelaksanaan Pemilu 2024 dengan menjaga marwah penegakan hukum agar tidak dijadikan alat politik praktis.

"Memastikan netralitas semua jajaran Kejaksaan dengan menjaga marwah penegakan hukum untuk tidak digunakan sebagai alat kepentingan atau politik praktis bagi kelompok manapun yang akan mempengaruhi dan mengganggu terselenggaranya Pemilihan Umum serentak 2024," kata Burhanudin. ● han

Ganjar Siapkan Tim Hukum Untuk Aiman yang Dipolisikan

SLEMAN (IM) - Capres Ganjar Pranowo bakal menyiapkan tim hukum untuk mendampingi Aiman. Witjaksono, Jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Aiman dipolisikan terkait pernyataannya polisi tidak netral.

"Ya kita siapkan tim hukum bisa mendampingi tapi lagi-lagi kita sangat percaya semua akan bekerja sangat profesional," kata Ganjar saat ditemui wartawan di UGM, Kamis (16/11).

Ganjar meminta agar nanti bukti dan fakta terkait pernyataan Aiman itu dibebaskan agar tidak menjadi fitnah.

"Saya sampaikan, seluruh

data, dan fakta musti betul-betul ditunjukkan biar nanti tidak menjadi fitnah," bebernya.

Ganjar mengatakan saat ini dirinya masih percaya aparat bisa netral. Apalagi petinggi Polri maupun TNI terus menggaungkan aparat harus netral.

"Saya orang yang percaya aparat bisa netral. Kepolisian bisa netral karena pengalaman-pengalaman itu sudah ditunjukkan. Saya kira petinggi TNI-Polri sudah menyampaikan itu. Apalagi saya anak polisi," katanya.

Aiman dipolisikan terkait postingannya yang membuat pernyataan soal polisi diperintah komandan memenangkan pasangan Prabowo-Gibran pada

Pilpres 2024.

Laporan dibuat oleh aliansi elemen masyarakat sipil untuk demokrasi yang terdiri dari garda pemilu damai, juga front pemuda jaga pemilu, dan juga barisan mahasiswa Jakarta.

Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/6813/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Aiman dipolisikan terkait Pasal 28 (2) juncto Pasal 45 A ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. ● me

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Gelar Acara Diseminasi Informasi Kependudukan



TANGERANG (IM) - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang kembali menggelar kegiatan rutin sosialisasi diseminasi informasi kependudukan yang dilaksanakan dua kali dalam setahun pada Selasa (14/11) di gedung MUI Kota Tangerang. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meng-up-date mengenai kependudukan dan nantinya disampaikan ke masyarakat.

Dikesempatan ini hadir para kepala seksi tata pemerintahan di kelurahan dan staf pelayanan umum kecamatan di Kota Tangerang. Terdiri dari masing-masing perwakilan dari 13 kecamatan dan 104 kelurahan.

Materi pokok pada kegiatan ini terkait informasi kependudukan digital. Jadi saat ini Kemendagri melalui Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil di setiap kota atau kabupaten telah melaksanakan atau mengimplementasikan akan pentingnya informasi kependudukan berbasis identitas digital dengan aplikasi yang telah tersedia dan itu bisa langsung di download di play store lalu memilih aplikasi resmi Kependudukan Catatan Sipil RI.

"Dengan identitas kependudukan digital tersebut, Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kependudukan Catatan Sipil meminta kepada semua yang hadir disini agar dapat turut serta mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat secara luas di masing-masing wilayahnya," ujar R. Irman Pujahendra Kadis Kependudukan

Catatan Sipil Kota Tangerang melalui Didin Syarifudin, Kasie Inovasi dan Kerjasama. Ia berharap informasi tersebut dapat meningkat dan diketahui oleh masyarakat.

Tak hanya itu, pembahasan materi lain seperti halnya dari Pengadilan Negeri yang juga berbasis digital. "Nantinya, informasi keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan secara online atau daring. Aplikasi tersebut bernama Aplikasi Laks. Tambahan materi tambahan juga ada dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang terkait perlindungan data pribadi," ucapnya.

Ditambahkan, dengan tiga materi yang disampaikan itu dapat menambah literasi kepada Kasi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Umum kecamatan dan kelurahan yang nantinya dapat disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya di Kota Tangerang.

"Tahapan kedua sosialisasi

nantinya Dinas Kependudukan Catatan Sipil akan menghadirkan peserta yakni perwakilan dari tingkatan forum RT dan RW di Kota Tangerang terkait dengan informasi layanan digital lainnya," ujarnya.

Terakhir ia menjelaskan, untuk aplikasi identitas kependudukan digital seperti halnya KTP digital atau KK, setelah di download oleh masyarakat dan mengikuti arahan yang ada di aplikasi, proses akhir masyarakat memasukkan scan kode QR yang tersedia di kantor kecamatan terdekat atau bisa langsung ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tangerang.

"Ini akan menjadi penting nantinya, dengan aplikasi digital itu masyarakat dapat langsung mengakses identitas pribadi langsung terlihat di masing-masing gawai atau androidnya," pungkasnya. ● Adv



Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang R Irman Pujahendra saat memberikan sambutan.

PENGUMUMAN

Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 Ayat (2) jo. Pasal 127 (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diamandemen dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

PT Kreasi Unggul Investama, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdomisili di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Ruko Mahkota Raya Jl.Raja H Fisabilillah Blok E Nomor : 12, Desa/Kelurahan Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau ("Pembeli"), berencana mengambil mayoritas saham PT Karunia Senyum Sejathera, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia ("Perusahaan"). Sebagai akibat dari pengambilalihan saham, Pembeli akan menjadi pemegang saham mayoritas baru dari Perusahaan.

Pertanyaan atau keberatan dari kreditor atas rencana pengambilalihan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dalam waktu empat belas (14) hari sejak tanggal pengumuman ini ke:

PT Karunia Senyum Sejahtera

Ruko Mahkota Raya Jl.Raja H Fisabilillah Blok E Nomor : 12, Desa/Kelurahan Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

U.P: Direksi

Jakarta, 17 November 2023
Direksi

PT Karunia Senyum Sejahtera

PENGUMUMAN

Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diamandemen dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Union Smile Pte Ltd, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura ("Pembeli"), berencana untuk mengambil mayoritas saham baru yang diterbitkan oleh PT Kreasi Unggul Investama, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia ("Perusahaan"). Sebagai akibat dari pengambilalihan saham, Pembeli akan menjadi pemegang saham mayoritas baru dari Perusahaan.

Pertanyaan atau keberatan dari kreditor atas rencana pengambilalihan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dalam waktu empat belas (14) hari sejak tanggal pengumuman ini ke:

PT Kreasi Unggul Investama

Ruko Mahkota Raya Jl.Raja H Fisabilillah Blok E Nomor : 12, Desa/Kelurahan Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

U.P: Direksi

Jakarta, 17 November 2023
Direksi

PT Kreasi Unggul Investama

PENGUMUMAN HASIL AKHIR PROSES LIKUIDASI PT NOVA SEKURITAS (DALAM LIKUIDASI)

Merujuk pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Nova Sekuritas (Dalam Likuidasi) Nomor: 04 Tanggal 15 November 2023 yang dibuat dihadapan Ajeng Kumala Indriyani, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bekasi, Para Pemegang Saham telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menenerima Laporan Pertanggungjawaban Likuidator terkait proses pembubaran dan likuidasi PT Nova Sekuritas (Dalam Likuidasi) untuk seluruhnya; dan
2. Menyetujui dan memberikan pelunasan serta pembebasan kepada Likuidator dari tanggung jawabnya.

Demikianlah Pengumuman ini disampaikan guna memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 17 November 2023
Likuidator

PT Nova Sekuritas (Dalam Likuidasi)

Gempa Magnitudo 6,2 Guncang Wilayah Manado, Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA (IM) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan magnitudo 6,2 mengguncang wilayah Manado, Sulawesi Utara, Kamis (16/11/2023) pukul 06.26 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan, gempa ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9. Episenter gempa terletak di titik koordinat 1,98° LU ; 124,14° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 96 Km arah Barat Laut Kota Manado, Sulawesi Utara pada kedalaman 300 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa menengah akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng (Intraplate) Sangehe yang tersubduksi ke bawah laut Sulawesi," ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Sementara itu, hasil analisis menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan geser (strike-slip). Gempa ini berdampak dan dirasakan di daerah Kepulauan Sula, Tidore, Halmahera Barat dan Taliabu dengan skala intensitas II-III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan truk berlalu).

"Hasil pemodelan menunjukkan gempabumi ini tidak berpotensi tsunami," tegas Daryono.

Masyarakat diminta agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. "Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah," tuturnya. ● me